PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN, RASIO SOLVABILITAS, KOMPLEKSITAS, DAN UMUR PEMERINTAHAN TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Rury Windiyanti[1)] Eliya Isfaatun[2)]
[1)]Akuntansi STIE Nusa Megarkencana
Email :rurywindi96@gmail.com
[2)]Akuntansi STIE Nusa Megarkencana
Email :eliyais@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of financial independence, solvency ratios, complexity, and government age on financial distress of Regency / City Regional Governments in Indonesia.The data collection method used in this study was using purposive sampling technique is a sampling / data collection technique with a specific purpose in selecting samples randomly. The data analysis method used in this study is a causal associative study using a quantitative approach. Causal associative research is useful for analyzing the causal relationship of a variable to other variables by looking at the effect of independent variables on the dependent variable.Based on the results of the logistic regression analysis showing financial independence, solvability and complexity ratios do not affect the district / city regional government financial distress in Indonesia, while the age of the government influences the financial distress of district / city governments in Indonesia.Based on the results of the t-test, partially showing financial independence, solvability and complexity ratios do not affect the district / city regional government financial distress in Indonesia, while the age of the government influences the financial distress of district / city governments in Indonesia. While the results of the f-test, simultaneously financial independence, solvability ratio, complexity and age of government have an effect on the financial distress of Regency / City Governments in Indonesia.

Keywords ***: Financial Independence, Solvency Ratio, Complexity,Age of Government, Financial Distress.***

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Program tersebut tadinya diharapkan dapat memperbaiki masalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akan tetapi, adanya penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menimbulkan masalah baru.

Mengutip temuan CNN Indonesia pada tahun 2016, terdapat 244 pemerintah daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50%. Sisa anggarannya untuk belanja program dalam rangka memenuhi pelayanan publik (Armenia, 2016). Hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan pemerintah daerah dalam kondisi kebangkrutan atau mengalami permasalah pada ekonominya. Perekrutan pegawai baru setiap tahun juga dapat menyebabkan berkurangnya dana untuk memenuhi pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanahkan dalam kebijakan otonomi daerah.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Pada sektor publik, *financial distress* didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones & Walker, 2007 yang dikutip Syurmita 2014). Permasalahan tersebut disebabkan oleh pemerintah daerah yang tidak memiliki dana yang cukup dalam penyediaan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Jones & Walker (2007) seperti yang dikutip oleh Syurmita (2014) menggunakan dua indikator untuk memprediksi terjadinya *financial distress* negara bagian di Australia, yaitu indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan terdiri dari besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayanan publik dan rasio-rasio kinerja keuangan, sedangkan indikator non-keuangan terdiri dari karakteristik dewan dan kualitas pelayanan publik (Syurmita, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas, dan umur pemerintah terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komposisi pendapatan dan komitmen utang yaitu kemandirian keuangan dan rasio solvabilitas. Kemandirian keuangan dan rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kondisi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan indikator non-keuangan meliputi kondisi sosial-ekonomi dan fenomena umur pemerintah yang terjadi di Indonesia yaitu kompleksitas dan umur pemerintah. Kompleksitas dan umur pemerintah digunakan untuk melihat kondisi sosial-ekonomi pemerintah daerah (sebagai ukuran pembayaran transfer). Penentuan indikator-indikator tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Syurmita (2014) yang menemukan bahwa keempat variabel tersebut ditemukan berpengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan Syurmita (2014) terletak pada periode waktu yang berbeda. Syurmita (2014) menggunakan data tahun 2010 sementara penelitian ini menggunakan data terbaru yaitu tahun 2015. Selain itu, sampel dalam Syurmita (2014) dipilih secara random (*simple random sampling*), sementara sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010: 218), purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kelebihan dari metode *purposive sampling* adalah sampel dapat ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan jenis penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kemandirian keuangan berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakahrasio solvabilitas berpengaruh secara parsialterhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
3. Apakah kompleksitas berpengaruh secara parsialterhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
4. Apakah umur pemerintah berpengaruh secara parsialterhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
5. Apakah Kemandirian Keuangan, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas, dan Umur Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

Batasan Masalah

Atas beberapa pertimbangan yang telah diputuskan maka peneliti perlu melakukan beberapa pembatasan terhadap penelitian yang akan diteliti:

1. Data yang digunakan hanya data dalam periode satu tahun yaitu tahun 2015.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel, yaitu kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas, dan umur pemerintahan

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

B. KAJIAN LITERATUR

Financial Distress

Jones & Walker (2014) yang dikutip oleh Syurmita 2014 menjelaskan bahwa pada sektor publik "kesulitan keuangan" atau *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah tersebut disebabkan oleh pemerintah yang tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup dalam penyediaan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Kemandirian Keuangan

Menurut Halim (2008:232) yang dikutip oleh Sutaryo & dkk (2010), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapat yang dibutuhkan daerah.

Solvabilitas

Menurut Kasmir (2012:151) dalam Mirza (2012), dalam sektor swasta, rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Dalam sektor publik, rasio solvabilitas sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas pemerintah daerah (Syurmita, 2014).

Kompleksitas

Populasi penduduk di suatu wilayah dapat mencerminkan banyaknya masalah yang akan dihadapi oleh daerah tersebut. Jika populasi penduduk di suatu wilayah banyak, maka masalah yang akan dihadapi juga banyak sedangkan jika populasi penduduk di suatu wilayah sedikit maka masalah yang akan dihadapi juga sedikit.

Kompleksitas pada riset akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan proksi populasi penduduk di suatu wilayah pada periode tertentu (pemerintah daerah) tersebut (Syurmita, 2014).

Umur Pemerintah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah berlangsung sejak tahun 1999 (Syurmita, 2014). Data umur pemerintah bersumber dari *website* Direktorat Jendral Otonomi Daerah (http://otda.kemendagri.go.id/)

Umur pemerintah daerah dapat mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah daerah tersebut. Semakin lama umur pemerintah daerah maka dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut baik (Syurmita, 2014).

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

KerangkaPenelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang telah dibahas sebelumnya, rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan Gambar :

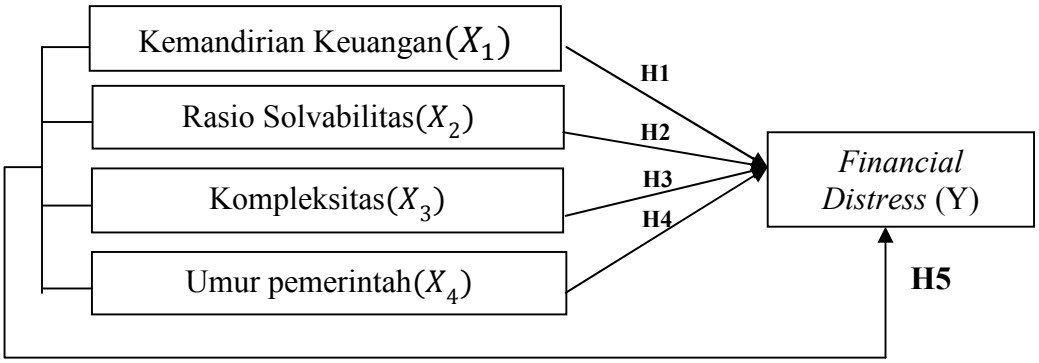

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Hipotesis Penelitian

H_1 : Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*.

$H0_1$: Kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap secara parsial terhadap *financial distress*.

H_2 : Rasio Solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress.*

$H0_2$: Rasio Solvabilitastidak berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress.*

H_3 : Kompleksitas pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*.

$H0_3$: Kompleksitas pemerintahtidak berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*.

H_4 : Umur Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*.

$H0_4$: Umur Pemerintahtidak berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress*.

H_5 **:** Kemandirian Keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas dan umur pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress.*

H_5 **:** Kemandirian Keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas dan umur pemerintahan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress.*

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal berguna untuk menganalisis hubungan sebab akibat suatu variabel terhadap variabel lainnya dengan melihat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependennya (Y) (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan hubungan kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas dan umur pemerintahan sebagai variabel independen dengan *financial distress* sebagai variabel dependennya.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang dilakukan dengan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pemgambilan sampel dengan tujuan tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak (Indriantoro dan Supomo, 1999: 131). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria pemerintah yang melakukan publikasi melalui internet laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang lengkap yang terdiri dari laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan neraca di *website* daerah tahun anggaran 2015.

Tabel 3.1
Pengambilan Data Sampel Populasi

Keterangan	Jumlah Populasi
Populasi Kabupaten/Kota	514 Kaabupaten/Kota
Kabupaten/Kota tidak Lengkap	460 Kabupaten/Kota
Sampel (Kabupaten/Kota Lengkap)	54 Kabupaten/Kota

Sumber : Kemendagri, 2018

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data keuangan dan non keuangan. Data keuangan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di *website* daerah dan data non keuangan dari Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).

Data sekunder berupa laporan keuangan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dipublikasi di *website* masing-masing pemerintah daerah. Data pemerintah daerah yang tidak publis laporan keuangan daerah terdapat di *website* KEMENKEU dan BPK RI, sedangkan data kompleksitas dan informasi umur pemerintah daerah di *website* KEMENDAGRI.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen, teks, atau karya seni yang kemudian dinarasikan (Pawito, 2008: 96). Data dalam penelitian ini adalah adalah kompleksitas, informasi umur pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di *website* daerah.

Alat Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013: 19).

Analisis *Logistic Regression*

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *logistic regression. Logistic regression* digunakan untuk menguji probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Alat analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *logisticregression.* Peneliti mengacu kepada penelitian Husniati, Fitriasuri, & Wahasusmiah (2016).Persamaan dapat ditulis sebagai berikut (Gujarati, 2003: 605)

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

$$L_n\left(\frac{F_d}{1-F_d}\right) = \beta_1 + \beta_2 \mathrm{KK}_i + \beta_3 \mathrm{RS}_i + \beta_4 \mathrm{K}_i + \beta_5 \mathrm{UP}_i + u_i$$

Keterangan:

F_d : *Financial distress*
KK : Kemandirian keuangan
RS : Rasio solvabilitas
K : Kompleksitas
UP : Umur pemerintah daerah
β_1 : Konstanta
β_2- β_5 :Konstanta *regresi*
u_i : *Error*

Uji Hipotesis

a) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

b) Uji Signifikan Parsial (Uji – t)

Ghozali (2013:125) mengatakan uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara individual atau parsial terhadap variabel dependen (Y).

Uji hipotesis ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel dalam tingkat probabilitas 5%. Kriteria :

1. Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\alpha < 0{,}05$, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Jika $-t_{tabel} < -t_{hitung}$ atau $t_{tabel} > t_{hitung}$ atau $\alpha < 0{,}05$, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

c) Uji signifikasi Simultan (uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas, dan umur pemerintahan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sekaran, 2003: 317).

Untuk mengujinya digunakan statistik f dengan membandingkan f hitung dengan f tabel dengan kriteria penerimaan sebagai berikut:

1. Jika f hitung > alpha 0,05 maka hipotesis ditolak.
2. Jika f hitung < alpha 0,05 maka hipotesis diterima.

D. PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan kurtosis (Ghozali, 2013: 19). Deskriptif mengenai variabel-variabel financial distress, kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas, umur pemerintahan sebagai berikut:

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan	54	.023712	41.18591	1.087271	5.59833
Rasio Solvabilitas	54	1.001472	1428.448	336.8726	345.8969
Kompleksitas	54	101397	3827709	945249.8	801763.6
Umur Pemerintahan	54	7	65	48.13	22.582
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan gambar 4.7 dapat dideskripsikan dari 54 pemerintah daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2015 sebanyak 30% tidak mengalami *financial distress* sedangkan 70% mengalami *financial distress*, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup dalam penyediaan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kemandirian keuangan menunjukkan angka 1,087271 yang artinya secara rata-rata kemandirian keuangan pemerintah daerah tinggi maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah (Halim, 2002). Rasio solvabilitas menunjukkan angka 336,8726 yang artinya secara rata-rata pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban keuangannya (Mahmudi, 2016: 113). Kompleksitas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 945.249,8. Umur pemerintah menunjukkan angka 50,12963 yang artinya secara rata-rata umur pemerintah daerah adalah lebih dari 50 tahun.

Analisis *Logistic Regression*

Analisis *logistic regression* digunakan untuk memperoleh gambaran probabilitas pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Persamaan *logisticregression* dapat dilihat dari tabel hasil *output SPSS*pada tabel 4.8 di bawah ini:

***Tabel* 4.2**
Hasil*Regression Logistic*
Coefficients[a]

Model	Coefficients	Probability
(Constant)	-1.084034	0.1838
Kemandirian Keuangan	0.024930	0.7622
Rasio Solvabilitas	-0.001124	0.2434
Kompleksitas	7.14E-07	0.1848
Umur Pemerintahan	0.037148	0.0149

a. Dependent Variable : Financial Distress

Sumber : Data diolah, 2018

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai konstanta $\beta_1$sebesar -1,084034dan koefisien regresi $\beta_5$0,037148. Nilai konstanta dan koefisien regresi (β_1,β_2,β_3, β_4, β_5) ini dimasukkanke dalam persamaan *logistic regression* berikut ini:

$$L_n\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_1 + \beta_5 \mathrm{UP}_i$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka persamaan *logisticregression* sebagai berikut:

FD =-1,084034 + 0,037148

a. Konstanta

Nilai konstanta *output* dari *Spss*pada tabel 4.3 sebesar -1,084034, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas yang terdiri dari kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas, dan umur pemerintah.

b. Kemandirian Keuangan (KK)

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh probabilitas ukuran pemerintah sebesar 0,7622 sehingga 0,7622 > 0,05 (α). Hasilnya menunjukan bahwa variabel kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

c. Rasio Solvabilitas (RS)

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh probabilitas rasio solvabilitas sebesar 0,2434, sehingga 0,2434 > 0,05 (α). Hasilnya menunjukkan bahwa variabel rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

d. Kompleksitas (K)

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh probabilitas kompleksitas sebesar 0,1848, sehingga 0,1848 > 0,05 (α). Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

e. Umur Pemerintahan (UP)

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh probabilitas umur pemerintahan sebesar 0,0149, sehingga 0,0149 < 0,05 (α). Hasilnya menunjukkan bahwa variabel umur pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress*.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen *(financial distress).*

Tabel 4.3
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.503[a]	.253	.193	.07639

a. Predictors: (Constant), UP, KK, RS, K

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 4.9 tersebut menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0,193 berarti 19,3% faktor-faktor Financial Distress dapat dijelaskan oleh kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas, dan umur pemerintah. Sedangkan sisanya 80,7% dijelaskan oleh faktor -faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen (KK, RS, K, UP) secara parsial terhadap variabel dependen (FD). Dari hasil pengujian dilihat nilai probabilitas sebagai berikut:

- Jika signifikansi> 0,05 (α) maka hipotesis penelitian ditolak
- Jika signifikansi< 0,05 (α) maka hipotesis penelitian diterima.

Tabel 4.4
Hasil Uji-t
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.314	.027		11.519	.000
	KK	.000	.002	-.024	-.192	.848
	RS	5.163E-5	.000	.210	1.663	.103
	K	-5.008E-9	.000	-.047	-.361	.720
	UP	-.002	.000	-.456	-3.502	.001

a. Dependent Variable: FD

Sumber : Data diolah, 2018

Hasil *Uji-t* pada tabel 4.10 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Kemandirian Keuangan (KK)
   Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh probabilitas ukuran pemerintah sebesar 0,848 sehingga 0,848 > 0,05 (α). Hasilnya menunjukan bahwa hipotesisditolak, artinya variabel kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.
2) Rasio Solvabilitas (RS)
   Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh probabilitas rasio solvabilitas sebesar 0,103 sehingga 0,103> 0,05 (α). Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya variabel rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.
3) Kompleksitas (K)
   Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh probabilitas kompleksitas sebesar 0,720 sehingga 0,720 > 0,05 (α). Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya variabel kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.
4) Umur Pemerintahan (UP)
   Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh probabilitas umur pemerintahan sebesar 0,001, sehingga 0,001 < 0,05 (α). Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya variabel umur pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress*.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f)

Uji F digunakan untuk menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variabel dependen. Untuk mengujinya digunakan statistik f dengan membandingkan f hitung dengan f tabel dengan kriteria penerimaan sebagai berikut:

- Jika f hitung > alpha 0,05 maka hipotesis ditolak.
- Jika f hitung < alpha 0,05 maka hipotesis diterima.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Tabel 4.5
Hasil Uji-F
ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.097	4	.024	4.160	.006[a]
	Residual	.286	49	.006		
	Total	.383	53			

a. Predictors: (Constant), UP, KK, RS, K

b. Dependent Variable: FD

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas jika menggunakan taraf signifikansi α = 5 % maka dapatdibandingkan bahwa signifikansi < α atau 0,006< 0,05. Hal ini berarti secara simultankemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas, dan umur pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress*.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian regresi logistik H_1tidak terdukung, sehingga tidak terdapat pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya semakin rendah kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (dana dari pemerintah pusat).

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik H_2tidak terdukung, sehingga tidak terdapat pengaruh rasio solvabilitas terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial* distress. Artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiabannya maka cenderung tidak akan mengalami *financial distress.*

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik H_3tidak terdukung, sehingga tidak terdapat pengaruh kompleksitas terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya semakin padat populasi penduduk maka cenderung akan mengalami *financial distress*, sedangkan semakin sedikit populasi penduduk maka cenderung tidak akan mengalami *financial distress*. Jadi semakin padat populasi penduduknya maka semakin besar juga transfer pemerintah pusat yang menyebabkankabupaten/kota tersebut ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan pengujian regresi logistik H_4 diterima, sehingga terdapat pengaruh umur pemerintahan terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa umur pemerintahan berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya pemerintah daerah yang merupakan daerah otonomi baru (berdiri mulai tahun 1999 (http://otda.kemendagri.go.id/) cenderung akan mengalami *financial distress*.

Berdasarkan pengujian regresi logistik H_5 diterima, sehingga terdapat pengaruh kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas dan umur pemerintahan secara bersama-sama terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, kompleksitas dan umur pemerintahanberpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya tinggi rendahnya kemandirian keuangan, tinggi rendahnya kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiabannya, padat atau tidaknya populasi penduduk, serta pemerintah daerah yang merupakan daerah otonomi baru maka cenderung akan mengalami *financial distress*.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pengujian regresi logistik H_1 tidak terdukung, sehingga tidak terdapat pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya semakin rendah kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (dana dari pemerintah pusat). Menurut UU No. 23 tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tiga sumber pendapatan, yaitu: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Jika pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah, maka akan membutuhkan dana dari sumber lain.

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik H_2 tidak terdukung, sehingga tidak terdapat pengaruh rasio solvabilitas terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial* distress. Artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiabannya maka cenderung tidak akan mengalami *financial distress.*

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik H_3 tidak terdukung, sehingga tidak terdapat pengaruh kompleksitas terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya semakin padat populasi penduduk maka cenderung akan mengalami *financial distress*, sedangkan semakin sedikit populasi penduduk maka cenderung tidak akan mengalami *financial distress*. Jadi semakin padat populasi penduduknya maka semakin besar juga transfer pemerintah pusat yang menyebabkan kabupaten/kota tersebut ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan pengujian regresi logistik H_4 diterima, sehingga terdapat pengaruh umur pemerintahan terhadap *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa umur pemerintahan berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya pemerintah daerah yang merupakan daerah otonomi baru cenderung akan mengalami *financial distress*. Hal ini diduga karena penyalahgunaan wewenang yang terjadi di pemerintah daerah.

F. DAFTAR PUSTAKA

Algifari. 2010. *Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis*.Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Armenia, R. 2016, 02 Juni. *Jumlah PNS Gemuk, Tren Belanja Pegawai Terus Meningkat*. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160602161500-20-135387/jumlah-pns-gemuk-tren-belanja-pegawai-terus-meningkat/(Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017 pukul 22.36)

Astuti, P., & Pamudji, S. 2015. Analisis Pengaruh Opini Going Concern, Likuiditas, Solvabilitas, Arus Kas, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11. Retrieved from http:/ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Atmaja, K. F. 2012. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi KemungkinanFinancial Distress*. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765.

Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen, 11 Desember 2013,[Online]. Didapatkan: Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri: keuda.kemendagri.go.id (Diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 21.41)

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 metode PLS regresi*. Edisi Ketujuh. Semarang: BPFE-UNDIP.

Gudono. 2009. *Teori Organisasi, Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE.

Gujarati N., Damodar. 2003. *Basic Econometrics international edition*. Edisi Keempat. New York: Mc GRAW–HILL.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Halim, A., Moi, M. O., & Baswir, R. 2016. Fiscal Distress of Local Goverment Study on Regencies/Cities in the Provinces of East Nusa Tenggara, Maluku, and North Maluku. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 151-158.

Hossain, Mohammed. 2008. *The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. European Journal of Scientific Research,* Vol.23, No.4, 660-681.

Husniati, S., Fitriasuri, & Wahasusmiah, R. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis, 150. Palembang*.

Ichsan, R. 2013, 12 Januari. *Teori Keagenan (Agency Theory)* [Online]. Didapatkan: https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory (Diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.30)

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE Yogyakarta: edisi pertama.

KEMENDAGRI. (n.d.). *Jumlah DOB tahun 1999 s.d 2014*. Retrieved from Direktorat Jenderal Otonomi Daerah: http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/totalDOB.pdf

Mahayani, N. L., & Gayatri. 2017. *Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan Level Of Capital Outlay Terhadap Financial Distress*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 452-478.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mirza, R. A. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010*.

Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif.* Edisi Kedua. Yogyakarta: LKis.

Putrawan, F. S. 2015, 28 Juni. *Makalah Teknik Sampling*. Diambil kembali dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)#Pengambilan_acak_berdasar_area_.28Cluster_sampling.29 (Diakses pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 21.45).

Prasetyaningsih. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Financial Distress Perusahaan Manufakturing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sampel (Statistika). 2016, 06 April. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)#Pengambilan_acak_berdasar_area_.28Cluster_sampling.29 (Diakses pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 21.47)

Sekaran, Uma. *2003*. *MetodologiPenelitianUntukBisnis*. Jakarta: Salemba 4

Sartika, Dewi.2016. Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2011-2013.

Sugiyono.2010. *MetodePenelitianPendidikanPendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutaryo dkk.2010. Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode Tahun 2007-2009.

Syaifudin.2013. Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Financial Distress Perusahaan Manufakturing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Syurmita.2014. Analisis Pengaruh Komposisi Pendapatan, Komitmen Keuangan, Populasi Penduduk dan Fenomena Pemekaran Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana